



# LAPORAN | 2019 KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Madiun ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

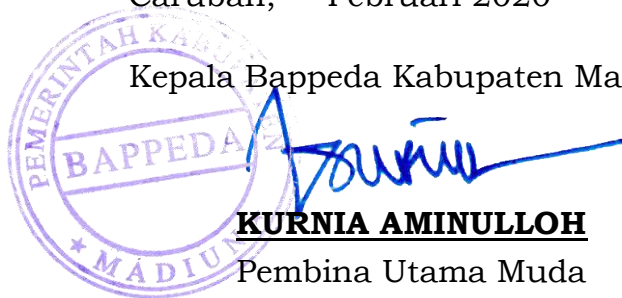
Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Madiun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Kinerja Bappeda Kabupaten Madiun diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2019.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Bappeda Kabupaten Madiun pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Bappeda Kabupaten Madiun secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Caruban, Februari 2020

Kepala Bappeda Kabupaten Madiun



**KURNIA AMINULLOH**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19700702 199003 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	vi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kab. Madiun .....	1
1.2. Isu Strategis.....	4
BAB II     PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Visi dan Misi .....	6
2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran .....	6
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	9
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja .....	9
3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2019.....	10
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	11
3.3. Realisasi Anggaran .....	23
3.4. Analisis Efisiensi .....	24
BAB IV    PENUTUP.....	27
LAMPIRAN.....	29

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran .....	7
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018... ..	7
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	9
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018.....	10
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel.....	12
Tabel 3.3.1 Dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2018.....	14
Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator kinerja Sasaran 1 Tahun 2012 - 2018.....	19
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya efektifitas capaian Kinerja pembangunan.....	20
Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2012 - 2018.....	21
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Keserasian dan keseimbangan Pemanfaatan tata ruang.....	22
Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW.....	23
Tabel 3.9 Proporsi APBD Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2012-2018.....	23
Tabel 3.10 Efisiensi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018.....	25

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Madiun .....	3
Gambar 3.1 Musrenbang Kecamatan Tahun 2018.....	16
Gambar 3.2 Musrenbang RKPD Tahun 2018.....	16
Gambar 3.3 Kegiatan BST dan TMMD Tahun 2018.....	17
Gambar 3.4 Sistem e-Monev.. .....	21

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
Lampiran 1a Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	30
Lampiran 1b Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	31
Lampiran 1c Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	33
Lampiran 1d Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	34
Lampiran 2 Matriks Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018.....	37
Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2018.....	42

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Bappeda Kabupaten Madiun, namun juga komitmen, keterlibatan seluruh instansi pemerintah.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 6.972.783.076,00 atau 82,28% dari pagu sebesar Rp. 8.474.372.690,00. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi / penghematan penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan capaian kinerja. Efisiensi tersebut berasal dari pengadaan modal, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas dan sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi, serta telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2019</b>
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD	100 %
Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah	a. Indeks Inovasi Daerah	83 %
	b. Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100 %

Sangat disadari, capaian kinerja Bappeda Kabupaten Madiun di tahun 2019 belum sesuai dengan yang diharapkan. Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dalam bentuk :

1. Perbaiki perencanaan dan estimasi serta penggunaan anggaran sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang ditunda atau ditangguhkan ;
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan karena koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya ;
3. Penambahan sarana dan prasarana berupa peralatan komputer dan sarana lain untuk menunjang operasional kegiatan ;
4. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan ;



5. Perlu diantisipasi untuk tahun yang akan datang melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam kelancaran proses pencairan dana, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Melalui Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Umum**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda periode 2019 – 2023. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan, baik ditingkat satuan kerja Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan staf. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Bappeda periode 2019 - 2023.

Pada tahun 2019, Bappeda melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dalam menghasilkan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 melalui serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas perencanaan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat pusat / daerah maupun sektoral / lintas sektoral.

Berdasarkan tugas tersebut, Bappeda akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Pertanggungjawaban kinerja Bappeda Tahun 2019 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat Pusat dan Daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Bappeda Tahun 2019 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja eselon 3 dan 4 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Badan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bappeda dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

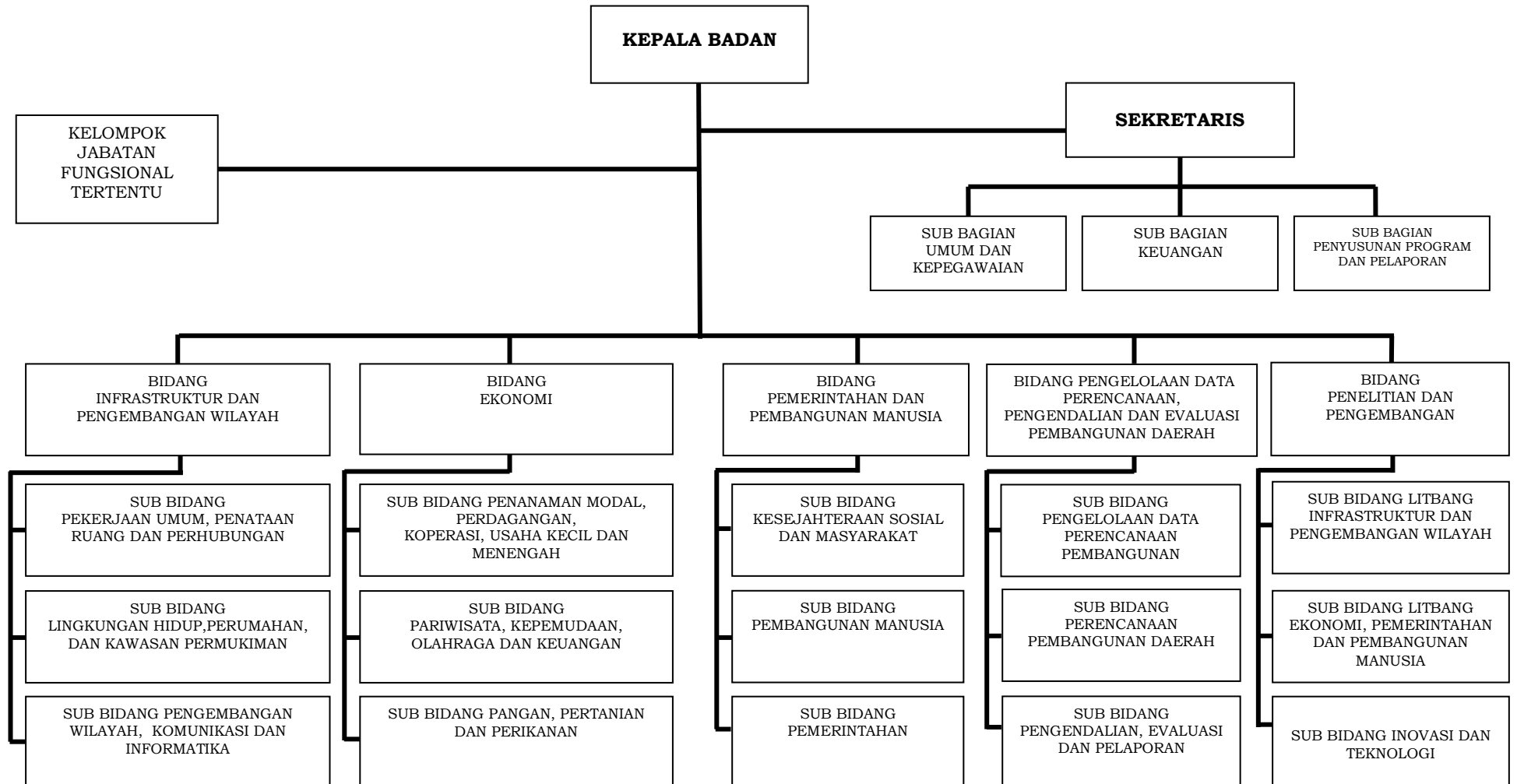
- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2 Organisasi Bappeda Kabupaten Madiun**

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta melakukan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

**Gambar 1.1.**

**Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Madiun**



### 1.3 Isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2013-2018 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2019-2023.

Belum tercapainya target pada tahun 2019 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung perencanaan ;
- b. Masih kurangnya tingkat koordinasi ;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi ;
- d. Kurangnya motivasi kerja ;
- e. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi ;
- f. Belum adanya tenaga fungsional perencana.

Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini :

- a. Belum optimalnya pemahaman dibidang perencanaan pembangunan ;
- b. Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Perencanaan Pembangunan daerah ;
- c. Penurunan disiplin kerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam perencanaan untuk periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ;
- b. Mempedomani peraturan perundangan untuk kesempurnaan perencanaan ;
- c. Mempedomani Renstra Kementerian /Lembaga sebagai acuan ;
- d. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi ;
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan ;
- f. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan ;
- g. Meningkatkan motivasi kerja aparatur ;
- h. Meningkatkan pemahaman di Bidang Perencanaan Pembangunan ;
- i. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan ;
- j. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah ;
- k. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran**

Guna memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja, tujuan strategis dijabarkan menjadi beberapa sasaran strategis yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk tahun 2019 (sebagaimana pada Perjanjian Kinerja) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2019</b>
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD	100 %
Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah	a. Indeks Inovasi Daerah	83 %
	b. Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100 %

#### **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Madiun, pada tahun 2019 terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda sebagai upaya untuk pencapaian kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Tabel 2.2.  
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>RUMUS</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD	(Jumlah Perangkat Daerah yang sesuai program RKPD dengan RPJMD / jumlah Perangkat Daerah x 100 %)	100%
2.	Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah	Indeks Inovasi Daerah	(Jumlah inovasi daerah yang terfasilitasi + jumlah inovasi daerah yang mendapatkan penghargaan) - jumlah inovasi daerah yang implementasikan) / 3 x 100%	83%
		Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	(Jumlah dokumen kajian, penelitian dan inovasidaerah yangditindaklanjuti / jumlah dokumen kajian,penelitian dan inovasi daerah yang dilaksanakan) x 100%	100%



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penetapan Kinerja (PK) Bappeda Kabupaten Madiun. Tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* perencanaan yang sudah dibuat, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan perencanaan yang telah dibuat.

#### **3.1. Pengukuran Capaian Kinerja**

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Sedangkan untuk hasilnya dapat dilihat pada Lampiran Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2019.

Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel yang menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

**Tabel 3.1.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai	
2	< 100%	Tidak Tercapai	

### **3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2019**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk tahun 2019. Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	<b>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah</b>			
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	<b>Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah</b>			
1.	Indeks Inovasi Daerah (%)	83,33	83,33	100
2.	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah (%)	100	100	100

Pengukuran terhadap Indikator Utama Bappeda pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang bervariasi. Terdapat 3 (tiga) indikator yaitu indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD, Indeks Inovasi Daerah dan Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah, ketiga indikator tersebut telah tercapai. Pencapaian sasaran kinerja di Perangkat Daerah juga perlu mendapatkan perhatian lebih, dalam hal ketepatan waktu didalam memberikan laporan dan menginput capaian kinerja Perangkat Daerah pada sistem yang telah disediakan, untuk mempercepat dan mempermudah evaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah selama tahun berjalan.

### **3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Madiun tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Madiun tahun 2019, disajikan sebagai berikut:

## SASARAN 1

### Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah

Sasaran 'Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah' diukur melalui indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Daerah ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Bappeda sebagai institusi yang mempunyai Tupoksi di bidang perencanaan pembangunan, harus memastikan dan mengawal bahwa program yang ada di Perangkat Daerah sesuai dengan program yang terdapat di RPJMD. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah**

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Tahun 2019			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100	100	Tercapai

*Sumber : Bappeda, 2019.*

Sasaran pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Bappeda harus menyusun dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan, yang mampu menampung aspirasi masyarakat, efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pelaksanaan maupun hasilnya. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan beberapa analisis dan dokumen perencanaan pendukung yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.4. sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Pengukuran Kinerja Program Perencanaan Daerah**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kategori</b>
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100	Tercapai
Persentase PD yg menyusun dokumen Renja tahunan berkualitas baik (%)	100	100	100	Tercapai
Persentase capaian kinerja program/kegiatan RKPD (%)	76	76	100	Tercapai
Persentase usulan Musrenbang yang teromodir dalam RKPD (%)	50	29,44	58,88	Tidak Tercapai

*Sumber : Bappeda, 2019.*

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja 'meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah' sudah tercapai. Sementara untuk Pengukuran Kinerja Program Perencanaan Daerah, belum dapat tercapai keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD belum sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 50 %. Belum terakomodir ini disebabkan banyaknya usulan dari desa yang tidak sesuai dengan program kegiatan yang ada di Perangkat Daerah masing-masing.

Untuk mencapai pencapaian indikator kinerja ini dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan yang disusun adalah dokumen perencanaan baik yang rutin disusun setiap tahun seperti RKPD dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) juga dokumen penunjang perencanaan lainnya seperti dokumen Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosbud Penmas, dan lain-lain ;

2. Monitoring dan Evaluasi

Hal ini dilakukan untuk mendeteksi lebih dini tingkat pencapaian kinerja daerah dan Perangkat Daerah pada tahun berjalan, agar apabila terjadi permasalahan dalam pencapaian target dapat segera dilakukan tindakan pencegahan dan tindak lanjut agar target dapat dicapai.

**Tabel 3.4.1**  
**Dokumen Perencanaan Daerah yang telah ditetapkan pada**  
**Tahun 2019**

No.	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Dokumen RKPD Perubahan	Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2019
2.	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Perkada	Peraturan Bupati Madiun Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2020
3.	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023	Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 188/682/KPTS/402.202/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023

*Sumber: Bappeda, 2019.*

Peraturan Bupati Madiun Nomor 20 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 54 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa RKPD paling lambat ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota pada akhir Mei tahun berkenaan. Sedangkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2018, disusun guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada



struktur APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018. Untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan diperlukan data informasi pembangunan daerah, yang merupakan data secara terpadu baik di daerah maupun pusat yang mengintegrasikan data-data lintas OPD, sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dukungan dalam perencanaan.

Capaian indikator Kinerja Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD (%) sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD mencapai 100%, sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan indikator kinerja RKPD 2019 sudah mengacu pada sasaran kinerja RPJMD. Untuk selanjutnya, ini harus terus ditingkatkan sehingga, target sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan dalam RPJMD dapat tercapai. Faktor pendukung tercapainya Persentase sasaran kinerja dalam RKPD yang sesuai RPJMD adalah komitmen dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menjadikan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Capaian indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Tahunan berkualitas baik (%) sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Tahunan berkualitas baik mencapai 100%, sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Renja yang disusun oleh Perangkat Daerah sudah baik dan mengacu pada RKPD yang sudah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja persentase capaian kinerja program/kegiatan RKPD (%) sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian kinerja program/kegiatan RKPD mencapai

76%, sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 76%. Grade penilaian tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah program/kegiatan RKPD yang mencapai target sesuai dengan program/kegiatan seluruhnya dalam RKPD.

Capaian indikator Kinerja Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD (%) belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD baru mencapai 29,44%, belum sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 50%. Faktor penyebab belum tercapainya target Kinerja Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD, karena banyaknya usulan dari Desa/Masyarakat yang tidak sesuai dengan program/kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.

Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan dengan melaksanakan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di 15 Kecamatan pada tahun 2019 dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk mengakomodasi usulan dari masyarakat dalam penyusunan RKPD tahun 2020.

Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019. Persentase peserta Musrenbang yang hadir mencapai 100%, yang dihadiri oleh seluruh OPD, Delegasi Kecamatan, instansi vertikal dan Tokoh Masyarakat. Selain itu Bappeda juga menyusun Perubahan RKPD tahun 2019 yang dilaksanakan untuk melengkapi dan menyempurnakan

program kegiatan serta target yang harus dicapai pada tahun 2019, dalam rangka mendukung pencapaian target tahun pertama RPJMD 2018-2023.

Setelah RKPD ditetapkan maka dilanjutkan dengan penyusunan KUA/PPAS 2020 untuk RAPBD TA. 2020 dan KUA/PPAS Perubahan 2019 untuk R-APBD Perubahan TA. 2019. Untuk menjaga agar APBD sesuai dengan dokumen perencanaan, maka diharapkan program/kegiatan yang diakomodasi dalam APBD tidak lepas dari KUA/PPAS yang telah ditetapkan.

Untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Bappeda melaksanakan kegiatan Penunjang Bhakti Sosial Terpadu (BST) di 14 Desa di Kabupaten Madiun selama Tahun 2019, yaitu :

1. Bulan Januari di Desa Kedungrejo, Kec. Balerejo ;
2. Bulan Februari di Desa Kanung, Kec. Sawahan ;
3. Bulan Februari di Desa Nglandung, Kec. Geger
4. Bulan Februari di Desa Jetis, Kec. Dagangan
5. Bulan Februari di Desa Kenongorejo, Kec. Pilangkenceng
6. Bulan Februari di Desa Klitik, Kec. Wonoasri
7. Bulan Februari di Desa Bongsopotro, Kec. Saradan
8. Bulan Februari di Desa Bacem, Kec. Kebonsari
9. Bulan Februari di Desa Kedungjati, Kec. Balerejo
10. Bulan Februari di Desa Sawahan, Kec. Sawahan
11. Bulan Februari di Desa Luworo, Kec. Pilangkenceng
12. Bulan Februari di Desa Uteran, Kec. Geger
13. Bulan Februari di Desa Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng
14. Bulan Februari di Desa Padas, Kec. Dagangan

Dalam kegiatan BST masyarakat dapat menyampaikan usulan/permasalahan pembangunan secara langsung kepada Bapak Bupati dan jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Madiun.

## SASARAN 2

### Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah

Sasaran meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah diukur melalui indikator sasaran yaitu Indeks inovasi daerah dan Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa pengukuran inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah terlaksana dan untuk meningkatkan pertumbuhan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.5.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Fungsi Litbang**  
**Sebagai Dasar Merumuskan Kebijakan Daerah**

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Tahun 2019			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Inovasi Daerah	66,66	83,33	83,33	100	Tercapai
Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100	100	100	100	Tercapai

*Sumber : Bappeda, 2019.*

Sasaran Pengukuran Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan diukur melalui indikator yaitu Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan (%). Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan Bappeda harus mengawal ketercapaian sasaran kinerja baik untuk Kabupaten maupun ketercapaian sasaran kinerja setiap OPD. Karena ketercapaian sasaran kinerja setiap tahun sangat berpengaruh terhadap ketercapaian sasaran kinerja akhir tahun RPJMD.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.6. sebagai berikut :

**Tabel 3.6.**  
**Pengukuran Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kategori</b>
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	100	100	Tercapai
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan (%)	100	100	100	Tercapai

*Sumber : Bappeda, 2019.*

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada 2 tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah dan Persentase hasil kelitbangan yg ditindaklanjuti

Perangkat Daerah pada tahun 2019, sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari capaian persentase sasaran kinerja telah mencapai 100 %.

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

**Tabel 3.5.**  
**Proporsi APBD Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018-2019**

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung	
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	2018	3.642.051.947	3.502.153.355	10.114.738.500	8.256.239.197
2.	2019	4.284.502.169	3.618.264.509	8.474.372.690	6.972.783.076

Sumber : Bappeda, 2019

Perbandingan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 73,53% apabila dibandingkan dengan total belanja. Ini menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan di Bappeda relatif besar proporsinya. Dengan demikian diharapkan manfaat yang dirasakan masyarakat di bidang perencanaan juga semakin besar. Pada tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, dengan anggaran belanja langsung sebesar

Rp 10.114.738.500,00, tercapai realisasi sebesar Rp. 8.256.239.197,00 atau terealisasi sebesar 81,63%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran setiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar adalah program/kegiatan pada sasaran pertama, yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah Rp 3.960.250.674,00 dan kemudian program pada Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Rp. 1.903.306.370,00 dengan persentase 83,96%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Realisasi Anggaran Per Sasaran  
Tahun 2019**

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Daerah	Indikator Outcome / Output	Target Outcome / Output	Capaian Outcome / Output	Anggaran (Rp)	Realisasi	
							Rp	%
<b>I</b>	<b>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah</b>							
1	<i>Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD</i>			100%	100%			100%
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan Pendukung operasi Perkantoran	100%	85%	<b>1.545.905.750</b>	<b>1.300.534.737</b>	<b>84,13</b>
		1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlayannya komunikasi, air dan listrik yang aktif	12 Bulan	12 Bulan	188.096.000	134.298.814	71,40
		2 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang	2 Orang	63.000.000	43.200.000	68,57
		3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	123.500.000	121.582.200	98,45
		4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	56.700.000	21.451.700	37,83



		5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.500.000	12.140.500	49,55
		6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	12 Bulan	25.150.000	15.198.095	60,43
		7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	8.000.000	5.104.000	63,80
		8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	92.359.750	57.882.750	62,67
		9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	698.600.000	644.992.527	92,33
		10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	39.470.000	98,68
		11	Penyediaan Jasa Pengamanan	Tersedianya jasa pengamanan kantor	3 Orang	3 Orang	110.000.000	102.670.150	93,34
		12	Penyediaan Jasa Publikasi	Tersedianya Jasa Publikasi	12 Bulan	12 Bulan	116.000.000	102.544.001	88,40

		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	25%	<b>674.500.000</b>	<b>550.947.215</b>	<b>81,68</b>
		1 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	3 Bulan	3 Bulan	26.000.000	-	0,00
		2 Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	142.000.000	140.855.000	99,19
		3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	147.500.000	110.347.780	74,81
		4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	211.000.000	187.075.135	88,66
		5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	2.918.500	14,59
		6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	3 Bulan	3 Bulan	90.000.000	89.000.000	98,89
		7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/Printer/AC dan Mesin Ketik)	Terpeliharanya Alat Kantor Pendukung	12 Bulan	12 Bulan	38.000.000	20.750.800	54,61

		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	Persentase kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu	100%	25%	<b>30.025.000</b>	<b>21.064.000</b>	<b>70,15</b>
		1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	75%	30.025.000	21.064.000	70,15
		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase PD yg menyusun dokumen Renja tahunan berkualitas baik	100%	20%	<b>1.138.710.750</b>	<b>968.625.325</b>	<b>85,06</b>
			Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%				
			Persentase usulan Musrenbang yang terokomodir dalam RKPD	50%				
			Persentase rata-rata capaian kinerja program pembangunan daerah	100%				
		1 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah buku LKPJ yang disediakan	150 Buku	-	165.250.000	130.909.575	79,22

		2	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6 Dokumen	5 Dokumen	683.140.250	648.604.950	94,94
		3	Pengumpulan, Verifikasi dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengisi data SIPD	53 OPD	53 OPD	138.961.925	134.757.950	96,97
		4	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kab. Madiun	Jumlah laporan dan evaluasi program/kegiatan pembangunan Kab Madiun	4 Laporan	4 Laporan	151.358.575	54.352.850	35,91
			<b>Program Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah</b>	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara Renja dengan Renstra di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%		<b>2.266.793.565</b>	<b>1.903.306.370</b>	<b>83,96</b>
				Persentase rata-rata capaian kinerja program di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%				

			Persentase usulan Musrenbang yang terokomodir dalam RKPD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	50%					
			Persentase kesesuaian Renstra OPD dengan RPJMD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan perumahan, permukiman dan pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	216.890.000	189.942.750	87,58
		2	Penyusunan Dokumen Perencanaan PU, Perhubungan dan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Perencanaan PU, Perhubungan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	790.100.350	704.493.750	89,17
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kominfo	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kominfo	2 Dokumen	2 Dokumen	474.685.215	386.927.748	81,51

		4	Pendukung Kegiatan IPDMIP	Jumlah dokumen IPDMIP yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	535.118.000	461.590.690	86,26
		5	Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha				250.000.000	160.351.432	64,14
			<b>Program Perencanaan Bidang Ekonomi Dan SDA</b>	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara Renja dengan Renstra di lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	100%		<b>427.354.950</b>	<b>396.971.479</b>	<b>92,89</b>
				Persentase rata-rata capaian kinerja program di lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	100%				
				Persentase usulan Musrenbang yang terokomodir dalam RKPD di lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	50%				

			Persentase kesesuaian Renstra OPD dengan RPJMD dilingkup Bidang Ekonomi dan SDA	100%					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaani Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen perencanaan bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaha mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	92.283.700	88.531.000	95,93
		2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	67.295.900	48.688.729	72,35
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pertanian, Pangan dan LH	Jumlah dokumen perencanaan bidang pertanian, pangan dan LH	4 Dokumen	4 Dokumen	267.775.350	259.751.750	97,00
			<b>Program Perencanaan Bidang Sosbud Dan Penmas</b>	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara Renja dengan Renstra di lingkup Bidang Sosbud Dan Penmas	100%		<b>816.558.225</b>	<b>691.347.500</b>	<b>84,67</b>

			Persentase rata-rata capaian kinerja program di lingkup Bidang Sosbud Dan Penmas	100%					
			Persentase usulan Musrenbang yang teromodir dalam RKPD di lingkup Bidang Sosbud Dan Penmas	50%					
			Persentase kesesuaian Renstra OPD dengan RPJMD di lingkup Bidang Sosbud Dan Penmas	100%					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan kesejahteraan sosial dan masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	383.918.250	372.270.000	96,97
		2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen perencanaan sumber daya manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	34.757.725	34.748.000	99,97
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen perencanaan pemerintah dan aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	166.439.550	72.381.450	43,49



		4 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/ Lembaga/ Perusahaan (DID)	Audiensi Bupati dengan Forum CSR  Adanya data kerjasama antar lembaga		-	231.442.700	211.948.050	91,58
<b>II</b>	<b>Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah</b>							
		<b>Program Penelitian Dan Pengembangan</b>	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	<b>1.574.524.450</b>	<b>1.139.986.450</b>	<b>72,40</b>
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan	100%				
1	<i>Persentase hasil kelitbangan yg ditindaklanjuti PD</i>			<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
		1 Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dimanfaatkan	2 Kajian	1 Kajian	228.821.700	209.176.100	91,41

		2	Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, SOSBUD, PEN MAS	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Ekonomi, SDA, Sosial Budaya, Pembangunan Masyarakat yang dimanfaatkan	2 Kajian	1 Kajian	381.675.200	346.145.750	90,69
		3	Penyusunan SAKIP melalui SIMDA SAKIP				150.000.000	30.281.250	20,19
		4	Analisis Capaian Indeks Kesalehan Sosial				150.000.000	102.535.250	68,36
		5	Analisis Indikator Bidang Ekonomi, SDA, Sosbud dan Penmas				179.500.000	113.395.000	63,17
2	<i>Indeks inovasi daerah</i>				<i>66,66</i>	<i>83,33</i>			<i>100%</i>
		6	Inovasi Dan Penerbitan Hasil - Hasil Kelitbangan	Jumlah inovasi yang ditindaklanjuti	14 Inovasi	-	284.527.550	143.079.350	50,29
				Jumlah hasil-hasil kelitbangan yang dipublikasikan melalui jurnal	10 Kajian	5 Kajian			
		7	Inovasi Pemanfaatan Limbah Tahu			Dokumen Laporan Hasil Penelitian	200.000.000	195.373.750	97,69
					<b>J U M L A H</b>		<b>8.474.372.690</b>	<b>6.972.783.076</b>	<b>82,28</b>

### **3.4. ANALISIS EFISIENSI**

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Bappeda tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**REALISASI KINERJA DAN EFISIENSI ANGGARAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2019**

Lampiran 3

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian	Program	Efisiensi		Penyerapan (%)	Ket. Pencapaian
			Target	Realisasi			Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD (%)	100%	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.138.710.750	968.625.325	85,06	Efisien
						Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.266.793.565	1.903.306.370	83,96	Efisien
						Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat	816.558.225	691.347.500	84,67	Efisien
						Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	427.354.950	396.971.479	92,89	Efisien
2	Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan	1 Indeks inovasi daerah (%)	88,33%	88,33%	100%	Program Penelitian dan Pengembangan	1.574.524.450	1.139.986.450	72,40	Efisien
		2 Persentase hasil kelitbangan yg ditindaklanjuti Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%					

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bappeda Kabupaten Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum tercapai secara keseluruhan. Pada Tahun 2019 Persentase usulan Musrenbang yang terokomodir dalam RKPD (%) kurang dari 50%. Namun demikian rata-rata capaian kinerja masih lebih besar dari capaian kinerja keuangan.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dalam bentuk :

1. Perbaiki perencanaan dan estimasi serta penggunaan anggaran sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang ditunda atau ditangguhkan.
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan karena koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
3. Diperlukan Program/kegiatan untuk mengkomodasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Bappeda yang belum terpenuhi.
4. Penambahan sarana dan prasarana berupa peralatan komputer dan sarana lain untuk menunjang operasional kegiatan.

5. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan.
6. Perlu diantisipasi untuk tahun yang akan datang melalui koordinasi dengan SKPD terkait dalam kelancaran proses pencairan dana, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2018 S/D 2023**

**“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG STRATEGIS, MENUJU TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA 2018”**

**Misi 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik**

**Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif dan Akuntabel**

No	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2018	Target Tahun 2019
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas baik (%)	$(\text{jumlah dokumen perencanaan berkualitas baik} / \text{jumlah dokumen perencanaan}) \times 100\%$	-	100

Sasaran										Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD (%)	Jumlah Perangkat Daerah yang sesuai program RKPD dengan RPJMD/ jumlah Perangkat Daerah x 100%	100	100	100	100	100	100	100	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung secara efektif serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen pendukung yang tepat waktu	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
											2 Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
											3 Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
											4 Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	



**Tujuan 2 : Mengoptimalkan peran litbang dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah**

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2018	Target Tahun 2019
1	Persentase sasaran Kinerja daerah yang tercapai (%)	(Sasaran kinerja daerah yang tercapai/ Sasaran Kinerja Daerah) X 100 %	-	100

Sasaran										Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah	1 Indeks inovasi daerah (%)	(Jumlah inovasi daerah yang terfasilitasi + jumlah inovasi daerah yang mendapatkan penghargaan ) - jumlah inovasi daerah yang implementasikan) /3 x 100%	-	83	83	83	100	100	100		1 Program Penelitian dan Pengembangan	
	2 Persentase hasil kelitbangan yg ditindaklanjuti Perangkat Daerah (%)	(Jumlah dokumen kajian, penelitian dan inovasidaerah yangditindaklanjuti / jumlah dokumen kajian,penelitian dan inovasi daerah yang dilaksanakan) x 100%	-	100	100	100	100	100	100			

**Tujuan : Meningkatkan kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda**

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2018	Target Tahun 2019
1	Presentase operasional kantor yang terpenuhi (%)	(Operasional kantor yang diadakan/ operasional kantor yang dibutuhkan) X 100	100	100

Sasaran										Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Meningkatnya kapasitas Bappeda	1 Persentase sarana dan prasarana kerja terpenuhi (%)	(Sarana dan prasarana kerja yang diadakan/ sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan) X 100	100	100	100	100	100	100	100	Mencukupi sarana prasarana penunjang kinerja, penyusunan pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu dan peningkatan kualitas SDM Bappeda	1 Program Pelayanan Kesekretariatan	
	2 Persentase pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu (%)	(Jumlah pelaporan kinerja Bappeda tepat waktu / jumlah seluruh pelaporan kinerja Bappeda) X 100	100	100	100	100	100	100	100			

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD	(%)	100
2	Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah	Indeks inovasi daerah	(%)	83,00
		Persentase hasil kelitbangan yg ditindaklanjuti Perangkat Daerah	(%)	100

**REALISASI KINERJA DAN EFISIENSI ANGGARAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2019**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Capaian	Program	Efisiensi		Penyerapan (%)	Ket. Pencapaian
			Target	Realisasi			Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.138.710.750	968.625.325	85,06	Efisien
						Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.266.793.565	1.903.306.370	83,96	Efisien
						Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat	816.558.225	691.347.500	84,67	Efisien
						Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	427.354.950	396.971.479	92,89	Efisien
2	Meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah	1 Indeks inovasi daerah (%)	-	-		Program Penelitian dan Pengembangan	1.574.524.450	1.139.986.450	72,40	Efisien
		2 Persentase hasil kelitbangan yg ditindaklanjuti Perangkat Daerah (%)	-	-						